

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Sustainable Development Goals (SDGs) *dan*

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR)

Serupa Tapi Tak Sama



Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Sustainable Development Goals (SDGs) *dan*

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR)

Serupa Tapi Tak Sama



INSIGHT
PUSTAKA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Serupa Tapi Tak Sama

Penulis:

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si., Ak.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Insight Pustaka Nusa Utama

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: insightpustaka@gmail.com

Web: www.insightpustaka.com

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2025

Editor: Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, SE., Ak., M.Si.

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-59-2

x + 244 hlm; 15,5x23 cm.

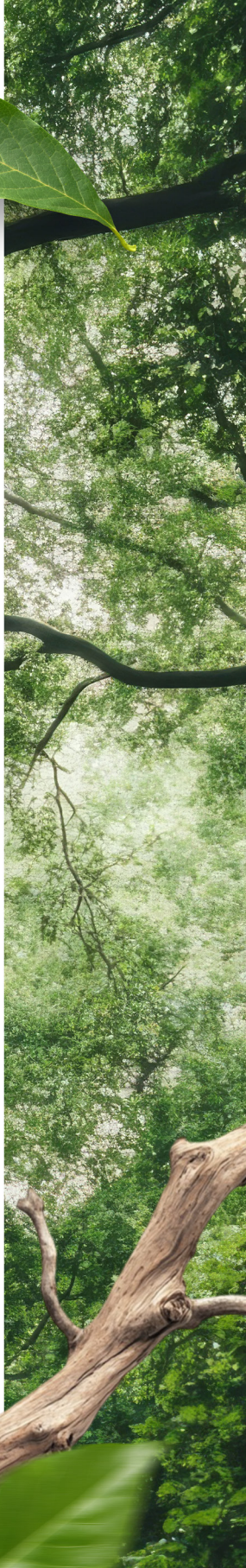
©Desember 2025



Prakata

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu strategis dalam dinamika global dewasa ini. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, kemiskinan, serta degradasi lingkungan, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) hadir sebagai agenda global yang memberikan arah dan kerangka kerja dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan peran dunia usaha dengan pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

SDGs dan CSR merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam praktik pembangunan modern. SDGs memberikan panduan strategis berupa tujuan dan indikator global yang terukur, sementara CSR menjadi wujud nyata kontribusi sektor bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Melalui penerapan CSR yang terintegrasi dengan SDGs, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Integrasi ini mendorong



terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembahasan dimulai dari aspek historis dan konseptual SDGs, dilanjutkan dengan analisis isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi, hingga peran CSR sebagai strategi implementatif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan global. Selain itu, buku ini juga mengkaji aspek kelembagaan, regulasi, teknologi, pembiayaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi SDGs dan CSR.

Lebih lanjut, buku ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi SDGs dan CSR, baik pada tingkat global maupun nasional. Isu seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, kompleksitas regulasi, serta kesenjangan pembangunan menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Di sisi lain, peluang yang muncul melalui inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan memberikan harapan bagi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi bisnis, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis, pembaca diharapkan mampu memahami serta mengaplikasikan konsep SDGs dan CSR dalam berbagai konteks kehidupan dan kegiatan profesional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan kajian di bidang pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam

pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi generasi masa depan.



Daftar Isi

iii—Prakata

v—Prolog

vii —Daftar Isi

BAB I

1—PENGENALAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs): SEJARAH DAN DASAR-DASAR

1—Latar Belakang dan Perkembangan SDGs

6—Transformasi Strategis: Dari MDGs menuju SDGs

10—17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

15—Prinsip dan Kerangka Dasar SDGs

BAB II

21—KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SDGs

21—Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

24—Tujuan dan Manfaat Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs)

28—Indikator Pencapaian SDGs

BAB III

35—SDGS DAN LINGKUNGAN

- 35—Tujuan SDGs Berkaitan dengan Lingkungan
- 41—Perubahan Iklim
- 47—Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 50—Pelestarian Keanekaragaman Hayati

BAB IV

57—SDGS DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

- 57—Upaya Mengurangi Kemiskinan
- 65—Pendidikan Berkualitas
- 71—Kesehatan dan Kesejahteraan
- 80—Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam SDGs

BAB V

85—SDGS DAN EKONOMI BERKELANJUTAN

- 85—Pengertian Ekonomi Hijau
- 89—Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia
- 92—Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- 99—Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

BAB VI

107—SDGS DI TINGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT

- 107—Pelaksanaan SDGs di Daerah
- 112—Peran Komunitas, LSM, dan Organisasi
- 116—Partisipasi Masyarakat dalam SDGs

BAB VII

121—TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK SDGS

- 121—Peran Teknologi dalam SDGs
- 123—Inovasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
- 124—Teknologi Informasi dan Komunikasi SDGs
- 126—Digitalisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan

BAB VIII

129—PEMBIAYAAN SDGS

- 129—Sumber Pendanaan SDGs
- 134—Peran Lembaga Keuangan
- 139—Model Pembiayaan Inovatif

BAB IX

145—TANTANGAN DALAM MENCAPAI SDGS

- 145—SDGs dalam Perspektif Global
- 149—Permasalahan Umum SDGs
- 153—Tantangan di Berbagai Negara
- 156—Tantangan di Indonesia

BAB X

161—MONITORING DAN EVALUASI SDGS

- 161—Indikator untuk Mengukur Kemajuan
- 165—Peran Data dan Statistik
- 169—Sistem Monitoring SDGs

BAB XI

173—CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

KONSEP DAN PRINSIP

173—Pengertian CSR

177—Konsep Konsep CSR

182—Prinsip Prinsip CSR

186—Manfaat CSR

BAB XII

191—LANDASAN TEORI CSR

191—Teori Stakeholder

195—Teori *Economic Accounting*

200—Teori Akuntabilitas

203—Teori Keberlanjutan

BAB XIII

207—PELAKSANAAN DAN PELAPORAN CSR

207—Pelaksanaan CSR

210—Metode Implementasi CSR

214—Tahapan Penerapan CSR

BAB XIV

221—HUBUNGAN SDGS DAN CSR DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

221—Hubungan antara SDGs dan CSR

225—Peran CSR dalam Mendukung SDGs

227—Integrasi dalam Kebijakan dan Program

231—Epilog

233—Daftar Pustaka

243 — Profil Penulis



Prolog

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keberlanjutan telah menjadi isu utama dalam praktik pembangunan dan bisnis modern. Perubahan iklim, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, serta keterbatasan sumber daya alam menuntut adanya pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan bertanggung jawab. Pada titik inilah Sustainable Development Goals (SDGs) dan Corporate Social Responsibility (CSR) hadir sebagai dua pilar utama yang tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam membentuk arah pembangunan dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Buku ini berangkat dari pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. SDGs memberikan kerangka global yang komprehensif dengan 17 tujuan utama yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sisi lain, CSR menjadi wujud konkret kontribusi perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui berbagai program dan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Keduanya saling melengkapi

dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial.

Dalam praktiknya, implementasi SDGs dan CSR tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Perusahaan sering dihadapkan pada dilema antara pencapaian keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, kurangnya integrasi strategi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas regulasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sistematis agar SDGs dan CSR tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berdampak.

Struktur buku ini dirancang untuk memberikan alur pemahaman yang komprehensif, dimulai dari konsep dasar dan prinsip SDGs, dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu strategis seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, buku ini mengulas konsep dan teori CSR serta bagaimana implementasinya dapat diintegrasikan dengan SDGs. Pada bagian akhir, pembaca diajak memahami aspek kelembagaan, regulasi, teknologi, pembiayaan, serta tantangan dan prospek di masa depan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh, buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal (*no one left behind*). Dalam konteks ini, CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban perusahaan, tetapi sebagai strategi bisnis yang mampu menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi perusahaan dan masyarakat.

Penulis mengajak pembaca untuk melihat SDGs dan CSR sebagai bagian dari transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan pemahaman yang utuh dan komitmen yang kuat, diharapkan lahir praktik pembangunan dan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan generasi mendatang. Buku ini diharapkan dapat menjadi

sumber inspirasi dan referensi dalam membangun sinergi antara pembangunan global dan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan.





BAB I

PENGENALAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS): SEJARAH DAN DASAR-DASAR

Latar Belakang dan Perkembangan SDGs

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang menekankan pada keseimbangan yang harmonis dan proporsional antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini mulai mendapatkan atensi global secara masif sejak diselenggarakannya *United Nations Conference on the Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi tersebut menjadi

tonggak sejarah bagi kesadaran internasional terhadap dampak destruktif dari industrialisasi yang eksploitatif dan pembangunan yang tidak terkontrol terhadap ekosistem global. Momentum ini juga menandai lahirnya urgensi pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana guna menjamin kelangsungan hidup manusia dalam jangka panjang (United Nations, 1972).

Perkembangan konseptual pembangunan berkelanjutan mencapai titik krusial melalui laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1987 yang secara luas dikenal sebagai *Brundtland Report*. Dalam laporan monumental bertajuk “*Our Common Future*” tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (World Commission on Environment and Development, 1987). Definisi ini bukan sekadar pernyataan filosofis, melainkan menjadi fondasi fundamental yang melandasi perumusan kebijakan pembangunan global. Hal ini mempertegas adanya kewajiban moral antar-generasi (*intergenerational equity*) dalam pemanfaatan kekayaan bumi, di mana generasi sekarang bertindak sebagai pemegang amanah bagi generasi masa depan.

Komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan semakin dipertegas melalui *Earth Summit* di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan Agenda 21. Dokumen ini merupakan sebuah rencana aksi global komprehensif yang dirancang untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan pembangunan ke dalam kebijakan nasional maupun internasional secara terstruktur dan sistemik (United Nations, 1992). Agenda tersebut menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi inklusif serta kemitraan strategis dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat sebagai regulator, sektor swasta sebagai motor inovasi ekonomi, hingga masyarakat sipil dan komunitas lokal sebagai agen pengawasan di lapangan.

Memasuki milenium baru pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai agenda pembangunan global yang berfokus pada delapan tujuan utama



BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SDGS

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs), yang secara resmi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan sebuah paradigma pembangunan global yang bersifat komprehensif, transformatif, dan berorientasi pada masa depan. Agenda ini terdiri atas 17 tujuan utama yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 169 target spesifik yang saling berkaitan, saling menyokong, dan bersifat tidak dapat dipisahkan (*indivisible*). Agenda ambisius ini diadopsi secara konsensus oleh seluruh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada tanggal 25 September 2015 melalui resolusi majelis umum yang bertajuk “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Dokumen ini menjadi kontrak sosial global yang mengikat secara moral seluruh bangsa untuk beralih ke jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara historis, SDGs dirancang sebagai kerangka kerja yang melampaui capaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu 2000 hingga 2015. Jika MDGs cenderung berfokus pada isu-isu sosial dasar di negara-negara berkembang—seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan kesehatan ibu—SDGs melakukan ekspansi cakupan secara radikal. SDGs memasukkan aspek ketimpangan ekonomi yang lebih luas, keadilan iklim, konsumsi bertanggung jawab, serta tata kelola kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, SDGs menciptakan standar pembangunan yang lebih holistik yang mengakui bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan planet dan stabilitas perdamaian.

Implementasi SDGs berlandaskan pada tiga prinsip utama yang mendasar sebagai berikut:

1. Holistik dan Terintegrasi

SDGs tidak memandang dimensi pembangunan secara parsial atau terkotak-kotak (*silo*). Sebaliknya, agenda ini mengintegrasikan dimensi sosial (seperti kesehatan dan pendidikan), dimensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak), serta dimensi lingkungan (perlindungan ekosistem darat, laut, dan aksi iklim) secara simultan. Prinsip ini mengakui adanya hubungan sebab-akibat yang kompleks di mana keberhasilan pada satu tujuan sering kali bergantung pada penyelesaian masalah di tujuan lainnya. Sebagai contoh, kemajuan signifikan dalam kesehatan masyarakat (Tujuan 3) sangat dipengaruhi oleh ketersediaan akses air bersih dan sanitasi (Tujuan 6), serta kualitas udara yang dipengaruhi oleh kebijakan energi bersih (Tujuan 7). Kegagalan dalam satu aspek lingkungan dapat memicu





BAB III

SDGS DAN LINGKUNGAN

Tujuan SDGs Berkaitan dengan Lingkungan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global komprehensif yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dunia secara terpadu, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Agenda ini disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 melalui dokumen visioner bertajuk *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang berfungsi sebagai kompas strategis bagi pembangunan global hingga tahun 2030 (SDGs Center Universitas Sumatera Utara, 2024).

Dokumen ini menggarisbawahi komitmen internasional yang ambisius untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan dalam satu generasi, sembari memastikan bahwa integritas planet bumi tetap terjaga guna mendukung kehidupan bagi generasi mendatang.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, aspek lingkungan menempati posisi sentral sebagai salah satu pilar utama yang menentukan resiliensi peradaban manusia dan stabilitas ekosistem bumi secara keseluruhan. Pilar lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, perlindungan ekosistem yang rapuh dari eksploitasi berlebihan, serta upaya terstruktur dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang kian ekstrem dan tidak terduga. Pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis atau hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial jangka pendek dapat memicu berbagai krisis sistemik yang bersifat irreversibel atau tidak dapat dipulihkan. Krisis tersebut mencakup degradasi masif ekosistem hutan hujan dan lahan basah, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) yang mengancam ketahanan pangan serta kemurnian genetik, pencemaran lingkungan yang bersifat toksik di darat dan laut, serta meningkatnya frekuensi bencana alam hidro-meteorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan berkepanjangan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Implikasi dari kegagalan pengelolaan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memicu disrupsi sosial yang hebat, termasuk munculnya fenomena migrasi paksa akibat perubahan iklim (*climate refugees*) dan instabilitas ekonomi global yang dipicu oleh kelangkaan sumber daya primer.

SDGs memandang bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan manusia yang bermartabat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, beberapa tujuan SDGs secara spesifik diorientasikan pada upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan. Tujuan-tujuan ini mencakup SDG 6 mengenai ketersediaan air bersih dan sanitasi, SDG 7 tentang transisi energi bersih dan terjangkau, SDG 12 terkait transformasi pola konsumsi



BAB IV

SDGS DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

Upaya Mengurangi Kemiskinan

Memahami Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling kompleks, bersifat persisten, dan menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan global karena sifatnya yang dapat melumpuhkan potensi sumber daya manusia secara sistemik. Secara umum, kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi kronis ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya finansial maupun modal sosial yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang paling fundamental, seperti pangan bernutrisi seimbang, pakaian yang layak pelindung tubuh, dan

tempat tinggal yang aman serta sehat. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada rendahnya tingkat pendapatan absolut atau daya beli semata, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas yang membebaskan, layanan kesehatan esensial yang terjangkau, pekerjaan yang bermartabat dengan upah layak, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kemiskinan saat ini dipandang sebagai fenomena multidimensional (*multi-dimensional phenomenon*) yang mencerminkan ketidakmampuan kumulatif seseorang untuk mencapai standar kehidupan yang layak, berdaya saing, dan sejahtera sesuai dengan norma serta tuntutan kemajuan yang berlaku dalam masyarakat modern.

1. Definisi Kemiskinan

Dalam kajian sosiologi pembangunan dan ekonomi kesejahteraan, kemiskinan umumnya dikategorikan ke dalam dua bentuk utama untuk memfasilitasi perumusan kebijakan yang lebih presisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi ekstrem ketika pendapatan atau konsumsi seseorang berada di bawah ambang batas dasar yang diperlukan untuk sekadar mempertahankan fungsi biologis tubuh dan bertahan hidup secara fisik. Indikator ini biasanya diukur menggunakan garis kemiskinan internasional (*international poverty line*) yang ditetapkan oleh lembaga global seperti Bank Dunia, yang sering kali didasarkan pada perhitungan biaya pemenuhan kebutuhan kalori harian minimum (biasanya 2.100 kkal per orang) ditambah dengan kebutuhan non-pangan dasar yang bersifat darurat.

Sementara itu, kemiskinan relatif mengacu pada kondisi ketika individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang secara signifikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup rata-rata atau median masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif ini, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek kelangsungan hidup biologis, tetapi juga dari sudut pandang eksklusi sosial dan ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam struktur hierarki masyarakat. Seseorang







BAB V

SDGS DAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Pengertian Ekonomi Hijau

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) mengalami perkembangan signifikan secara periodik seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap urgensi keberlanjutan lingkungan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Pada fase awal, ekonomi hijau dipahami secara sempit sebagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada aktivitas ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan standar lingkungan, penilaian ekonomi terhadap aset lingkungan (*environmental valuation*), serta pemberian sanksi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem. Seiring dengan perkembangan pemikiran ekonomi lingkungan, definisi tersebut mengalami

perluasan menjadi suatu pendekatan holistik yang mendorong produksi barang dan jasa secara berkelanjutan serta mengintegrasikan aspek kelestarian dalam setiap proses ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2012).

Evolusi konsep ekonomi hijau juga menunjukkan adanya pergeseran perspektif dari pendekatan konvensional yang sekadar berupaya “menghijaukan kegiatan ekonomi” (setelah sebelumnya mengabaikan dampak lingkungan), menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Paradigma baru ini menekankan pada pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan (*green jobs*) melalui investasi hijau (*green investment*), serta pola produksi, perdagangan, dan konsumsi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran lingkungan secara sistemik serta terciptanya produk yang lebih ramah lingkungan (Kementerian PPN/Bappenas, 2012).

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), ekonomi hijau didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dengan kata lain, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang rendah karbon (*low carbon*), efisien dalam penggunaan sumber daya, serta bersifat inklusif secara sosial (UNEP, 2010).

Urgensi Peralihan Menuju Ekonomi Hijau

Kebutuhan untuk bertransisi menuju ekonomi hijau dapat dipahami melalui perbandingan antara model ekonomi arus utama (*mainstream economics*) dengan konsep pertumbuhan hijau dan kesejahteraan berkelanjutan. Model ekonomi arus utama yang berbasis pada pemikiran ekonomi neoklasik menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan primer pembangunan, yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi melalui mekanisme efek







BAB VI

SDGS DI TINGKAT DAERAH DAN MASYARAKAT

Pelaksanaan SDGs di Daerah

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai aktor kunci dalam keberhasilan pembangunan global. Hal ini dikarenakan sebagian besar target SDGs merupakan layanan publik dasar dan perubahan perilaku yang “terjadi di ruang lokal”, seperti reduksi kemiskinan ekstrem, penyediaan akses layanan kesehatan yang terjangkau, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, ketahanan ekonomi kerakyatan, serta penguatan inklusi sosial bagi kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, SDGs dipahami bukan sekadar sebagai

daftar target global yang bersifat abstrak atau administratif, melainkan sebagai kerangka pembangunan nasional yang perlu diterjemahkan secara presisi (*localized*) ke dalam dokumen perencanaan, sistem penganggaran, program kerja nyata, serta mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang adaptif di tingkat daerah (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Lokalisasi SDGs: Dari Komitmen Global ke Praktik Daerah

Pelaksanaan SDGs di daerah dimulai melalui proses lokalisasi, yaitu aktivitas menerjemahkan target-target global yang luas menjadi prioritas operasional dan indikator capaian yang relevan dengan karakteristik unik wilayah, kapasitas fiskal daerah, serta isu strategis lokal yang mendesak. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi manajerial dengan menata ulang cara merencanakan pembangunan agar selaras dengan tujuan yang terukur dan berorientasi pada hasil nyata (*result-oriented*). Di Indonesia, lokalisasi ini berkelindan erat dengan arsitektur perencanaan pembangunan yang bersifat hierarkis—mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Madya Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga penganggaran tahunan—yang secara ideal harus mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam logika kebijakan serta struktur belanja daerah (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Dukungan dari pemerintah pusat sangat memengaruhi akselerasi integrasi ini melalui berbagai instrumen koordinasi kelembagaan, pembinaan teknis yang berkelanjutan, dan sinkronisasi arah komunikasi kebijakan. Upaya mendorong implementasi SDGs menuntut adanya konsistensi politik yang kuat di tingkat pimpinan daerah serta dukungan administratif yang mumpuni agar agenda pembangunan ini tidak berhenti pada tingkat deklarasi atau simbolis semata (Arianto & Wirasenjaya, 2019). Implementasi di tingkat daerah akan menjadi jauh lebih kokoh apabila terdapat kesinambungan kebijakan dan pedoman teknis yang mampu mentransformasi SDGs menjadi kebutuhan pembangunan internal daerah yang mendesak, bukan sekadar dianggap sebagai “program tambahan” atau beban administratif dari pemerintah pusat (KemenPPN/Bappenas, 2020).







BAB VII

TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK SDGS

Peran Teknologi dalam SDGs

Teknologi memiliki peran strategis sebagai *enabler* (penggerak) utama dalam pencapaian SDGs. Sejarah panjang peradaban manusia menunjukkan bahwa setiap fase transformasi besar—mulai dari revolusi agraria yang menjamin ketahanan pangan hingga revolusi digital yang menghubungkan dunia—selalu ditopang oleh perkembangan teknologi yang radikal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi atau infrastruktur fisik semata, tetapi juga berperan sebagai instrumen transformasi sosial dan lingkungan yang mampu

mempercepat pencapaian target pembangunan global dengan cara-cara yang sebelumnya dianggap mustahil (IISD, 2023).

Teknologi berkontribusi langsung terhadap SDG 9 yang menekankan pentingnya pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur yang tangguh serta berkelanjutan. Infrastruktur digital yang merata, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta sistem produksi berbasis efisiensi sumber daya (*resource efficiency*) merupakan manifestasi konkret peran teknologi dalam memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan (TPB Kalbar, 2023). Infrastruktur yang dirancang agar adaptif terhadap risiko perubahan iklim serta perkembangan ekosistem ekonomi digital menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, teknologi juga mendukung pencapaian SDGs di sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. *Telemedicine* dan rekam medis elektronik memungkinkan perluasan akses layanan kesehatan spesialis hingga ke wilayah terpencil yang kekurangan tenaga medis, sementara platform pembelajaran daring (*online learning*) meruntuhkan batasan geografis dan finansial dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Di sektor agraria, penerapan teknologi pertanian presisi (*precision agriculture*) melalui penggunaan sensor tanah dan pemantauan satelit membantu petani meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan sekaligus memitigasi dampak kerusakan lingkungan melalui optimalisasi penggunaan pupuk, pestisida, dan air secara lebih terukur.

Pada skala industri kecil dan menengah (IKM), pemanfaatan inovasi teknologi terbukti mampu meningkatkan daya saing di tengah kompetisi global dan efisiensi operasional yang lebih baik. Studi di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dan mekanisasi dalam industri kecil berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi serta perluasan akses pasar melalui ekosistem *e-commerce* (Hidayat *et al.*, 2023). Hal ini mengonfirmasi bahwa teknologi dapat menjadi instrumen pemberdayaan





BAB VIII

PEMBIAYAAN SDGS

Sumber Pendanaan SDGs

Pembiayaan merupakan elemen krusial dan determinan utama dalam keberhasilan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda global ini menuntut mobilisasi sumber daya dalam skala besar, terukur, dan berkelanjutan untuk membiayai berbagai program strategis yang sangat kompleks, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur tangguh, hingga akselerasi transisi energi dan mitigasi perubahan iklim yang kian mendasak. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan bahwa negara-negara berkembang menghadapi

kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) sekitar 2,5 triliun dolar AS per tahun untuk mencapai target-target SDGs secara tepat waktu (UNCTAD, 2014). Kesenjangan masif ini menjadi sinyal kuat bahwa sumber pembiayaan konvensional dari anggaran negara saja tidak akan memadai, sehingga dibutuhkan diversifikasi sumber pendanaan yang terintegrasi, inovatif, dan kolaboratif antar-sektor.

World Bank (2019) menegaskan bahwa arsitektur pembiayaan pembangunan kontemporer tidak lagi dapat bergantung pada satu sumber dominan tunggal (seperti pajak domestik atau utang luar negeri), melainkan harus mampu memanfaatkan seluruh spektrum instrumen fiskal, pasar keuangan, dan pasar modal global secara cerdas. Strategi pembiayaan SDGs harus bersifat holistik dan sinergis, menggabungkan kekuatan pembiayaan publik, intensifnya investasi swasta, bantuan internasional, serta berbagai instrumen keuangan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai lingkungan dan sosial. Adapun beberapa sumber utama pembiayaan SDGs yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi agenda pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan Publik (*Public Finance*)

Pembiayaan publik tetap menjadi fondasi utama dan penggerak mula (*prime mover*) pendanaan SDGs, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki eksternalitas sosial tinggi namun profitabilitas finansial rendah, seperti layanan dasar di daerah terpencil. Anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD memainkan peran vital dalam mendanai sektor prioritas seperti perlindungan sosial bagi kelompok rentan, infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta pelayanan publik esensial yang menjamin keadilan sosial. Reformasi fiskal yang mencakup intensifikasi pajak, perluasan basis wajib pajak, serta penguatan administrasi perpajakan yang transparan dan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan domestik secara mandiri (World Bank, 2019).

Namun demikian, OECD (2015) menyoroti bahwa kebutuhan investasi untuk infrastruktur hijau dan energi bersih memerlukan







BAB IX

TANTANGAN DALAM MENCAPAI SDGS

SDGs dalam Perspektif Global

Dalam perspektif hubungan internasional, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan instrumen normatif global paling ambisius yang mencerminkan konsensus multilateral di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda ini melampaui sekadar dokumen kebijakan teknis; ia merupakan kerangka tata kelola global (*global governance framework*) yang secara moral dan politis mengarahkan negara-negara anggota untuk menyelaraskan kebijakan domestik mereka dengan komitmen internasional. Pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan sektoral yang

kaku menuju pendekatan integratif yang melampaui batas-batas negara kedaulatan menjadi ciri utama Agenda 2030 (United Nations, 2015). SDGs mengakui secara mendalam bahwa isu kemiskinan sistemik, krisis perubahan iklim, kerawanan pangan, ancaman kesehatan global, serta ketimpangan sosial merupakan persoalan transnasional atau “masalah tanpa paspor” yang mustahil dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara sehebat apa pun.

Secara konseptual, SDGs memperkuat prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR). Prinsip ini menekankan bahwa meski seluruh negara memiliki tanggung jawab kolektif terhadap masa depan bumi, tingkat kapasitas, beban historis, dan kontribusi nyata yang diharapkan dari setiap negara berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi dan stabilitas politiknya. Dalam praktiknya, integrasi 17 tujuan dan 169 target menuntut koordinasi lintas sektor, lintas negara, dan lintas aktor yang sangat intensif, melibatkan pemerintah, organisasi internasional, konglomerasi sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil (United Nations, 2015). Kompleksitas ini menjadikan SDGs sebagai proyek kolektif global paling masif yang pernah dicoba dalam sejarah modern.

Namun demikian, implementasi global SDGs menghadapi tantangan geopolitik yang terjal dan ketimpangan kapasitas antarnegara yang sangat lebar. Analisis kluster terhadap berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam kesiapan struktural, kualitas tata kelola birokrasi, serta tingkat pencapaian indikator SDGs antara negara maju (Global North) dan negara berkembang (Global South) (Çağlar & Gürler, 2022). Negara-negara dengan kapasitas ekonomi tinggi, sistem meritokrasi yang efisien, dan stabilitas politik yang mapan cenderung lebih mampu mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional mereka secara organik. Sebaliknya, negara-negara dengan kapasitas fiskal terbatas dan institusi yang rapuh menghadapi hambatan kronis dalam pendanaan, sinkronisasi kebijakan antar-lembaga, hingga pengawasan implementasi di tingkat akar rumput.





BAB X

MONITORING DAN EVALUASI SDGS

Indikator untuk Mengukur Kemajuan

Pengukuran kemajuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) didasarkan pada kerangka indikator global yang sangat komprehensif, yang disepakati oleh Majelis Umum PBB melalui *Global Indicator Framework* (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017). Kerangka kerja ini bukan sekadar daftar statistik yang statis, melainkan sebuah arsitektur data raksasa yang dinamis, mencakup 17 tujuan besar, 169 target spesifik, dan lebih dari 230 indikator unik. Indikator-indikator tersebut dirancang secara saintifik dan teknokratis untuk memantau, mengevaluasi, serta membandingkan perkembangan

setiap negara anggota secara objektif dalam upaya mencapai ambisi Agenda 2030 yang sangat transformatif.

Sejalan dengan kerangka indikator global tersebut, pengukuran kemajuan SDGs didasarkan pada beberapa prinsip dan pendekatan utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Filosofi Lima Pilar (5P)

Indikator SDGs disusun secara holistik untuk mencerminkan lima prinsip utama atau pilar filosofis yang saling terkait satu sama lain, yang dikenal sebagai 5P:

a. People (Manusia)

Pilar ini mengukur keberhasilan negara dalam menjamin martabat manusia melalui pengentasan kemiskinan ekstrem, penghapusan kelaparan, serta pemenuhan hak dasar atas layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang adil. Indikatornya mencakup variabel seperti Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat prevalensi *stunting* pada balita, hingga angka partisipasi sekolah yang inklusif.

b. Planet (Bumi)

Fokus utama pilar ini adalah pada keberlanjutan daya dukung lingkungan. Indikator yang digunakan meliputi proporsi luas kawasan hutan terhadap total daratan, tingkat konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perlindungan keanekaragaman hayati laut dan darat, serta efektivitas langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

c. Prosperity (Kesejahteraan)

Memantau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di mana kemakmuran dinikmati secara merata. Indikatornya melingkupi laju pertumbuhan PDB per kapita, perluasan inovasi teknologi pada infrastruktur industri, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio gini yang mengukur ketimpangan pendapatan antar-kelompok masyarakat.





BAB XI

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): KONSEP DAN PRINSIP

Pengertian CSR

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif utama, yaitu pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, CSR berkaitan erat dengan upaya mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab sosial sesaat yang bersifat karitatif, tetapi juga mencakup akuntabilitas (*accountability*) perusahaan secara menyeluruh terhadap masyarakat, bangsa, serta komunitas internasional (Nayenggita, 2019). Hal ini menyiratkan bahwa setiap

keputusan bisnis yang diambil oleh jajaran manajemen harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan ekonomi lokal, dan kelestarian ekologi global. Secara teknis, CSR belum memiliki definisi standar yang tunggal karena sifatnya yang dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan etika global, namun secara umum dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum perusahaan terhadap seluruh konsekuensi yang timbul dari operasional bisnisnya.

Landasan hukum CSR di Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3. Dalam regulasi tersebut, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Implikasi fundamental dari undang-undang ini adalah transformasi status CSR dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum (*mandatory*), khususnya bagi sektor-sektor usaha yang mengelola atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sejalan dengan hal tersebut, Departemen Sosial RI (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk menunjukkan kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, serta membangun kebersamaan melalui program kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dirancang sebagai wujud nyata kesetiakawanan sosial dan upaya preventif untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar aktivitas industrialisasi tidak mendegradasi kualitas hidup serta kesehatan penduduk di sekeliling wilayah operasional.

Dalam dimensi yang lebih luas, CSR merupakan proses strategis dalam pengaturan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini mencakup pihak internal seperti pemegang saham (*shareholders*), pekerja, dan investor, maupun pihak eksternal yang meliputi lembaga regulasi, masyarakat sipil, hingga perusahaan mitra dalam rantai pasok. Menurut Sankat (2002), CSR adalah





BAB XII

LANDASAN TEORI CSR

Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) merupakan sekumpulan kebijakan dan praktik yang mengatur hubungan dinamis serta timbal balik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. Teori ini didasarkan pada nilai-nilai etika universal, pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, penghormatan mendalam terhadap hak-hak masyarakat, pelestarian ekosistem lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi secara nyata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) didefinisikan sebagai semua pihak, baik individu maupun kelompok, yang keberadaannya memengaruhi atau

secara signifikan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan strategis dan aktivitas operasional harian perusahaan (Purwanto, 2011).

Kelompok ini mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari aset internal yang krusial seperti karyawan, hingga elemen eksternal yang kompleks seperti masyarakat lokal, perusahaan pesaing, pelanggan, pemasok, hingga pemerintah selaku regulator. Daud dan Amri (2008) berpendapat bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan pertimbangan paling krusial bagi perusahaan dalam menentukan strategi pengungkapan informasi, karena transparansi korporasi menjadi alat komunikasi utama untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan (*trust*) mereka.

Teori ini secara fundamental menegaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi dalam isolasi hampa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau pemuasan eksklusif segelintir pemilik modal. Sebaliknya, perusahaan harus mampu memberikan manfaat nyata, solusi sosial, dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingannya guna menjamin legitimasi serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Rhenald Kasali (dalam Purnasiswi, 2011) menyatakan bahwa *stakeholder* adalah setiap kelompok orang yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan. Dengan demikian, eksistensi suatu korporasi sangat bergantung pada tingkat dukungan, kualitas kerja sama, dan pengakuan legitimasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan tersebut (Fatoni dkk., 2016). Pada dasarnya, tanggung jawab perusahaan tidak lagi terbatas pada paradigma sempit maksimalisasi laba demi kepentingan pemegang saham semata (*shareholder primacy*), melainkan telah meluas menuju penciptaan kesejahteraan bersama (*shared value*) bagi seluruh pihak yang memiliki keterkaitan fungsional, ekonomi, hukum, maupun emosional terhadap setiap langkah bisnis perusahaan.

Implementasi teoretis dari pandangan inklusif ini diwujudkan secara konkret melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terstruktur. Dengan adanya program CSR yang terintegrasi ke dalam strategi inti, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan standar kesejahteraan karyawan melalui lingkungan kerja yang manusiawi, menjamin





BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN CSR

Pelaksanaan CSR

Dalam praktiknya, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) disesuaikan dengan kapasitas internal masing-masing perusahaan serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, bentuk kegiatan CSR sangat beragam dan bersifat kontekstual—tidak ada satu model tunggal yang dapat diterapkan secara seragam di semua industri. Implementasi ini sangat bergantung pada proses interaksi sosial yang dinamis, bersifat sukarela (*voluntary*) yang didasarkan pada dorongan moral serta etika bisnis yang tinggi, dan umumnya melampaui sekadar kepatuhan terhadap kewajiban peraturan perundang-undangan (*beyond compliance*).

Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas sekitarnya.

Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan jembatan krusial yang menghubungkan antara abstraksi tujuan kebijakan dan realisasinya melalui hasil kegiatan nyata yang dapat dirasakan oleh subjek kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle (1980) yang menyatakan bahwa tugas utama implementasi adalah membangun jaringan koordinasi yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan (*policy stakeholders*). Dalam konteks korporasi, hal ini mengimplikasikan pentingnya sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan program yang dijalankan tidak bersifat “menara gading” melainkan bumi dan relevan.

Lebih lanjut, Lane dalam Akip (2015) menyatakan bahwa konsep implementasi dapat dibagi ke dalam dua perspektif fungsi yang mendalam. Pertama, $Implementation = F(Intention, Output, Outcome)$. Berdasarkan definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari niat atau maksud tujuan awal, hasil nyata sebagai produk fisik atau jasa (*output*), serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan (*outcome*). Sebagai contoh, jika tujuannya adalah peningkatan literasi, maka *output*-nya adalah pembangunan perpustakaan desa, sedangkan *outcome*-nya adalah peningkatan tingkat kelulusan siswa di desa tersebut. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari $Implementation = F(Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)$. Penekanan utama dari kedua fungsi ini adalah pada kebijakan itu sendiri sebagai landasan pacu, yang kemudian hasil pencapaiannya dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan secara strategis (Sabatier, 1986).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Grindle (1980) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mencakup tiga elemen fundamental yang harus ada agar suatu program tidak gagal, yaitu:





BAB XIV

HUBUNGAN SDGS DAN CSR DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hubungan antara SDGs dan CSR

Hubungan antara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan keterkaitan yang semakin erat dalam praktik pembangunan berkelanjutan kontemporer. SDGs merupakan agenda global yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam satu kerangka pembangunan komprehensif yang dirancang untuk dicapai pada tahun 2030 (Adnyana *et al.*, 2024). Sementara itu, CSR merupakan instrumen korporasi yang menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan

dari aktivitas bisnisnya secara langsung maupun tidak langsung (Fidausya & Nawangsari, 2025). Keduanya memiliki irisan fundamental pada upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang agresif dan keberlanjutan daya dukung alam serta kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Secara empiris, implementasi CSR terbukti berpengaruh positif terhadap pencapaian target-target spesifik SDGs. Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan serta pencapaian SDGs (Adnyana *et al.*, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan yang secara konsisten melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) cenderung memiliki kinerja tata kelola yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar terhadap target pembangunan global. Dengan demikian, CSR tidak lagi sekadar dipandang sebagai kewajiban normatif atau aktivitas filantropi semata, melainkan telah bertransformasi menjadi mekanisme konkret untuk mendukung agenda pembangunan dunia yang terukur.

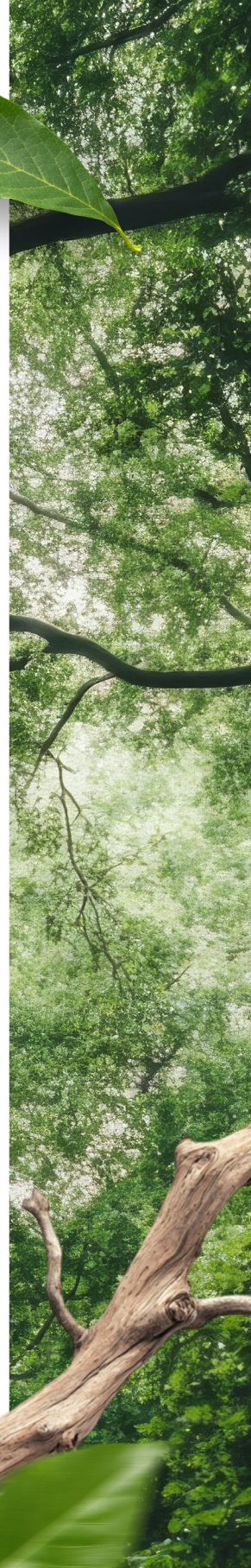
Hubungan tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan teori legitimasi (*legitimacy theory*). Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh operasionalnya, mulai dari karyawan, pemasok, pelanggan, hingga masyarakat lokal, dan tidak terbatas pada pemegang saham semata (Fidausya & Nawangsari, 2025). Implementasi CSR yang terintegrasi dengan SDGs mencerminkan upaya sistematis perusahaan dalam memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan tersebut pada aspek sosial dan lingkungan yang kian kritis. Sementara itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan senantiasa berupaya memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial melalui praktik bisnis yang selaras dengan nilai serta norma masyarakat luas (Adnyana *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, integrasi CSR dan SDGs menjadi strategi krusial untuk



Epilog

Buku *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* disusun sebagai upaya menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya integrasi antara agenda pembangunan global dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia modern. Pembangunan berkelanjutan tidak lagi dapat dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak yang melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, SDGs dan CSR menjadi dua elemen strategis yang saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Sepanjang pembahasan dalam buku ini, pembaca telah diajak untuk memahami konsep dasar SDGs sebagai kerangka global pembangunan, serta CSR sebagai instrumen implementatif dalam dunia bisnis. Berbagai aspek telah diuraikan, mulai dari isu lingkungan, pembangunan sosial, ekonomi berkelanjutan, hingga peran kelembagaan, teknologi, pembiayaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan,



tetapi juga oleh komitmen nyata dalam pelaksanaannya, terutama melalui peran aktif dunia usaha.

Dinamika global saat ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks dan multidimensional. Perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, krisis energi, serta perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya adaptasi yang berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak lagi cukup berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya. CSR menjadi sarana strategis untuk mewujudkan hal tersebut, sekaligus sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target-target SDGs.

Epilog ini menegaskan bahwa implementasi SDGs dan CSR merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan kebijakan global, inovasi teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan akan terus memengaruhi arah dan praktik pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan inklusif.

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi bisnis, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami dan mengimplementasikan konsep SDGs dan CSR secara lebih efektif. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya bukan hanya tentang mencapai target global, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Dengan semangat tersebut, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan.



Daftar Pustaka

- Adnyana, I. W. P., Adiputra, I. M. P., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh green accounting, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap sustainable development goals dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 288–301.
- Ahmed, S., & Goni, I. (2023). Challenges and prospects of Sustainable Development Goals (SDGs). *Fuwukari Journal of Politics and Development*, 84–97.
- Akip, M. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target dan strategi implementasi*. Bandung: Unpad Press.

- Anyebe. (2012). *Development administration: A perspective of challenges in Nigeria*. Shereef Salam.
- Aulia, N. O., Jannah, N., Safitriliani, S. I., & Suhatmi, E. C. (2024). Korelasi implementasi corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk upaya sustainable development goals (SDGs). *Seminar Nasional & Call for Paper HUBISINTEK 2024*, 829–836.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Bali Swain, R., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals: Predicaments and strategies. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 27(2), 96–106.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2021). *Low Carbon Development Indonesia: A paradigm shift towards green economy*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Barbier, E. B. (2010). *Rethinking the economic recovery: A global green new deal*. Cambridge University Press.
- Baughn, C. Bodie, N. and McIntosh, J. 2007. Corporate Social and Environmental Responsibility in Asian Countries and Other Geographical Regions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. Vol. 14
- Boege, V. (2018). *Climate change and conflict in Oceania: Challenges, responses, and suggestions for a policy-relevant research agenda*. Toda Peace Institute.
- Bovens, M., Goodin, R. E., Schillemans, T., & Mansbridge, J. (2014). A Contingency Theory of Accountability. *The Oxford Handbook of Public Accountability*.
- Brundtland Commission. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.

- Çağlar, M., & Gürler, C. (2022). Sustainable Development Goals: A cluster analysis of worldwide countries. *Environment, Development and Sustainability*.
- Capah, B. M., Rachim, H. A., & Raharjo, S. T. (2024). Implementasi SDG's-12 melalui pengembangan komunitas dalam program CSR. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 150–161.
- Chapple, W. and Moon, J. 2007. Introduction: CSR Agenda for Asia. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Vol. 14
- Climate Bonds Initiative. (2019). *Bonds and climate change: The state of the market 2019*. Climate Bonds Initiative.
- Collison, D and Kozuma, Y. 2002. Japanese social cohesion: an impediment to business success? Accounting and Business the ACCA members' Journal. September, 2002
- Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati. (2025). Program Keluarga Harapan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian literatur terhadap kontribusinya terhadap tujuan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4(3), 637–642.
- Elder, M., & Olsen, S. H. (2019). The design of environmental priorities in the SDGs. *Global Policy*, 10(S1), 70–82.
- Ellitan, Lena. 2008. Manajemen Strategi Operasi: Teori dan Riset di Indonesia. Bandung:32 CV. Alfabeta.
- FAO. (2021). *Sustainable agriculture for biodiversity*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fidausya, A. T. A., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan corporate social responsibility (CSR) terhadap reputasi perusahaan dan pencapaian SDGs di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(12), 323–331.*

Profil Penulis

Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti. SE., M.Si., Ak., CA., CSRS, CSRA.



Penulis lahir di Gianyar pada tanggal 06 Desember 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Udayana, dan pendidikan S3 pada Program Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya. Selain menjadi dosen, penulis aktif menjadi pembicara dan ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi wilayah Bali.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemdiktisaintek. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Korespondensi melalui email: sri.werastuti@undiksha.ac.

Sustainable Development Goals (SDGs) *dan*

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY (CSR)

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu strategis dalam dinamika global dewasa ini. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, kemiskinan, serta degradasi lingkungan, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan. Sustainable Development Goals (SDGs) hadir sebagai agenda global yang memberikan arah dan kerangka kerja dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan peran dunia usaha dengan pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

SDGs dan CSR merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam praktik pembangunan modern. SDGs memberikan panduan strategis berupa tujuan dan indikator global yang terukur, sementara CSR menjadi wujud nyata kontribusi sektor bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Melalui penerapan CSR yang terintegrasi dengan SDGs, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Integrasi ini mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, transparan, dan berorientasi jangka panjang.



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

• www.insightpustaka.com

☎ 0851-5086-7290

Ekonomi

+17

ISBN 978-634-7569-59-2



9 786347 569592